

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Operasional

1. Pariwisata

Pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta yang terdiri dari individualized organization "Pari" dan "Wisata". Yang mana diartikan perjalanan atau berpergian yang dilakukan berulang-ulang dengan mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Setiap orang yang berpergian dari tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu disebut Traveler, sedangkan orang yang berpergian melintasi suatu negara dengan tidak singgah walaupun perjalanan itu sendiri melebihi jangka waktu 24 jam disebut vacationer. (Heryati, 2019)

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. (Muljadi, 2009)

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (setiawan, 2021)

2. Wisata

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun kelompok dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman diluar aktivitas kesehariannya (seperti: bekerja,

sekolah, mengurus rumah tangga dll) dalam waktu yang sementara. Dari pengertian mengenai kegiatan wisata tersebut terlihat beberapa komponen penting yang menjadikan proses tersebut terjadi. Komponen-komponen tersebut adalah: tempat tinggal, perjalanan, pelaku perjalanan wisata, dan tempat tujuan. (Nurdin, 2017)

3. Potensi

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada daerah sangat penting untuk memahami potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mengembangkan pariwisata. (Wiyono, 2006)

4. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Jadi strategi adalah sebuah Tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (David, 2011)

5. Pengembangan

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

6. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. (Widiyoko, 2017)

7. Wisata Alam

Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik itu alami maupun budidaya. (Pengertian Wisata Alam, 2015)

8. Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. (Taufikzk, 2016)

2.1.2 Tinjauan Umum Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kata pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa inggrisnya disebut tour. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Mappa, 2012)

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut :

- a) Obyek daya tarik wisata (Attraction) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.
- b) Aksesibilitas (Accesibility) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi
- c) Amenitas (Amenities) yang mencakup fasilitas penunjamh dan pendukung wisata
- d) Fasilitas umum (Ancillary Service) yang mendukung kegiatan pariwisata

- e) Kelembagaan (Institutions) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Aspek 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Service).

a) Attraction

Menurut Suwena (2010: 88), atraksi atau obyek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (tourism resources). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu

- 1) Natural Resources (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit
- 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan
- 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain. Modal kepariwisataan menurut Suwena (2010: 89) dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (in situ) dan di luar tempatnya yang asli (ex situ). Atraksi wisata dibedakan lagi menjadi atraksi penahan dan atraksi penangkap wisatawan.

b) Accessibility

Menurut Sunaryo (2013: 173), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo (2013: 173) menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

c) Amenities

Sugiama (2011) menjelaskan bahwa amenities meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (entertainment), tempat-tempat perbelanjaan (retailing) dan layanan lainnya”. French dalam Sunaryo (2013: 173) memberikan batasan bahwa amenities bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenities akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.

d) Ancillary

Sugiama (2011) menjelaskan bahwa ancillary service mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.

Kelembagaan Pariwisata Kelembagaan

kepariwisataan dijelaskan dalam UU tentang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009 sebagai “keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan”. Sunaryo (2013: 117) menjelaskan peran dan fungsi dari komponen pelaku usaha maupun pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut:

a) Pemerintah Pusat maupun Daerah

Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan. Selain itu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan Khusus Pariwisata Nasional (KPPN).

Pemerintah daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (Industri dan Masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2009.

b) Swasta atau Industri Pariwisata

Organisasi swasta/industri juga dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 angka 7 dan 8 yang berarti orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menjadi penyedia barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Menurut UU tentang kepariwisataan juga dijelaskan bahwa ada dua lembaga swasta yang ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Kedua lembaga swasta tersebut adalah:

- 1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
- 2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang keanggotaannya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata

c) Masyarakat Pariwisata

Menurut penjelasan pasal 5 huruf e UU Kepariwisata No.10 tahun 2009 menyebutkan bahwa organisasi masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata yang berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik

sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah (Host) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti "Seni berperang" atau kepemimpinan dalam ketentaraan. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berarti.

- a. Pilihan strategi : Tujuan pemilihan strategi adalah untuk menjamin ketepatan pencapaian sasaran. Suatu rancangan strategi dapat dipilih untuk menutup kesenjangan dalam mencapai sasaran. Berkenaan dengan pilihan strategik maka akan dikaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats matrix), melalui cara ini dapat memandang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral dalam perumusan strategi.
- b. Strategi Pengembangan Wisata : Gamal Suwanto (1997:56) ada beberapa langkah pokok dalam melakukan strategi pengembangan pariwisata yakni dalam Jangka pendek dititik beratkan pada optimasi, dalam Jangka menengah dititik beratkan pada konsolidasi, dalam Jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan dan penyebaran. Perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Strategi yang tepat didasarkan pada kemampuan mengenali diri dan lingkungannya, sehingga strategi benar-benar dapat terwujud dari kekuatan yang dimilikinya dan peluang yang dihadapinya. Analisis yang tepat untuk

menyusun strategi adalah analisis SWOT. Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna (Suwantoro, 1997: 88-89).

2.1.4 Konsep Pengembangan Pariwisata berkelanjutan

Konsep Pengembangan berkelanjutan yang mana dirumuskan oleh *The World Commission For Environmental and Development* (WECD), yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan, yang mana didirikan oleh Majelis umum PBB. Dimana batasannya adalah sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan generasi sekarang tanpa mempertahankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Sutiarso, 2019)

Tujuan dari ini yaitu untuk memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis sampai pada penerapannya di lapangan khususnya di wilayah alam, pariwisata alam dapat menimbulkan ekologis yang khusus mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal yang paling utama. Suatu wilayah alami yang dibangun untuk rekreasi pasti akan di bangun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang berkembang pesat. (Hidayat, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata , 2011)

Secara strategis pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat dikembangkan dan diwaspadai dampaknya dengan memasukan rencana manajemen lingkungan dan pemantauannya dalam suatu rencana terpadu (*integrated*) dan pelaksanaannya yang kemudian dimasukan dalam tahap perencanaan pariwisata. Budaya dan Aspek fisik merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling mendukung di kawasan wisata alam. Untuk pengembangan konsep pariwisata alam berkelanjutan ini di butuhkan keterlibatan antara sector pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat. (Sutiarso, 2019) Terdapat beberapa indicator dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan antara lain :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Kepuasan masyarakat lokal
3. Kemudahan akses menuju tempat daya tarik
4. Terkendalinya dapat negative
5. Pelestarian Pustaka budaya dan alam
6. Terdapatnya partisipasi masyarakat
7. Kepuasan wisatawan
8. Kesehatan dan keselamatan umum
9. Memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pengusaha dan pemerintah
10. Menciptakan lapangan pekerjaan

Pembangunan kawasan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka Panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan pengembangan, pemanfaatan dan pemeriharaan sumber daya secara berkelanjutan. (Hidayat, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata , 2011)

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali dengan prinsip-prinsip yang elaborasi berikit. Ini Prinsip tersebut ialah Partisipasi, Keikut sertaan para pelaku (Stakeholder), Kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor, dan evaluasi akuntabilitas, penelitian serta promosi. (Sutiarso, 2019)

Pembangunan pariwisata melibatkan semua kalangan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah baik kalangan pemerintah, swasta ataupun masyarakat biasa. Masyarakat akan membantu apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu. Mereka akan tertarik ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat. Namun yang terjadi saat ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mana masih perlu peningkatan untuk kesadaran terhadap pentingnya pariwisata. (Sutiarso, 2019)

Masyarakat sadar wisata mempunyai arti sebagai masyarakat yang mengetahui dan menyadari apa yang akan dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata. Dengan adanya kesadaran ini maka akan berkembang pemahaman dan pengertian diantara berbagai pihak yang mendorong mereka untuk berperan dalam pembangunan pariwisata. (Hidayat, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata , 2011)

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) dan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Deveploment*) merupakan konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Menurut WTO dalam agenda 21 untuk industry travel dan pariwisata menyatakan bahwa *“Sustainable tourism development memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat daerah tujuan wisata sambil melindungi dan mengembangkan peluang pada masa depan. Dipandang sebagai sesuatu yang mengarahkan ke manajemen, seluruh sumber daya dengan cara dimana kebutuhan ekonomi, sosial dan estetik dapat dipenuhi bersama integritas budaya, proses-proses ekologi yang esensial, diversitas biologi dan sistem-sistem mendukung kehidupan tetap dipelihara”* (Hidayat, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata, 2011)

Isu – isu strategis dalam sustainable tourism adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tanggung jawab stakeholder corporate
- 2) Menghasilkan bentuk pariwisata yang cocok
- 3) Sumber daya sosial dan budaya “Sustaining”
- 4) Lingkungan alam “Sustaining”
- 5) Kebutuhan atas rencana yang efektif untuk perencanaan daerah tujuan wisata
- 6) Peran “Carrying Capatities” dan indicator-indikator dalam sustainable tourism
- 7) Menghindari konflik
- 8) Peningkatan keterlibatan masyarakat
- 9) Pengarahan untuk masa depan

2.1.5 Pendekatan dan Perencanaan Pariwisata

Perencanaan Pariwisata sekarang sangat perlu dilakukan karena dengan adanya perubahan dalam industry pariwisata saat ini. Pariwisata mencakup banyak

hal yang melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan strategi untuk perencanaan kegiatan wisata sehingga dapat berlangsung dengan baik. Pengembangan Pariwisata yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah sosial dan budaya. Perencanaan dan pertumbuhan pembangunan yang tidak direncanakan akan mengakibatkan degregasi atau penurunan daya tarik suatu atraksi wisata, bahkan dapat menjadi kerusakan lingkungan.

Pariwisata masa kini menjadi sangat khas karena melibatkan paduan budaya dan bentang alam sehingga melibatkan seluruh pihak untuk terkait didalamnya. Diantaranya adalah masyarakat lokal, pemerintah dan swasta dalam pelaksanaannya ketiga pihak ini saling melengkapi dimana pemerintah sebagai penyelenggara dan pihak swasta sebagai media perantara untuk menyampaikan produk wisata sedangkan masyarakat lokal adalah unsur yang paling penting dan terlibat dalam pemerintahan atau pihak swasta pun tidak dapat berdiri sendiri sehingga dalam penyelenggaraan pariwisata pemerintah dan swasta secara Bersama – sama dapat mendayagunakan komunitas dan masyarakat lokal untuk menjadi pelaksana kegiatan pariwisata. Berikut merupakan kompleksitas pariwisata dan sistem pariwisata yang mana terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller,(1997) yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang sehat
2. Kesejahteraan masyarakat lokal
3. Tidak merubah struktur alam dan melindungi sumber daya alam
4. Kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat
5. Memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan

Pendekatan dalam perencanaan pariwisata yaitu :

- 1) Pendekatan yang berkesinambungan, incremental, dan fleksibel
(*Continuous, incremental, and flexible approach*)

Perencanaan pariwisata dipandang sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus sehingga untuk penyesuaian yang dapat diperlukan

berdasarkan hasil monitoring dan umpan balik (Feedback) dalam kerangka pemeliharaan menjadi dasar dan kebijakan pengembangan pariwisata.

2) Pendekatan sistem (*Systems approach*)

Pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling keterkaitan harus direncanakan menggunakan teknik analisis sistem.

3) Pendekatan Komprehensif (*Comprehensive approach*)

Berkaitan dengan pendekatan sistem, seluruh aspek pengembangan pariwisata termasuk unsur-unsur institusional, implikasi sosial ekonomi dan lingkungan di analisis dan direncanakan secara komprehensif.

4) Pendekatan yang terintegrasi (*Integrated approach*)

Berkaitan dengan pendekatan sistem komprehensif pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi baik antara unsur di dalam sistem itu sendiri maupun dengan rencana dan pola-pola pembangunan secara keseluruhan.

5) Pendekatan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*Environmental and sustainable development approach*)

Pariwisata yang direncanakan, dikembangkan dan dikelola sedemikian rupa sehingga sumber daya alam dan budaya tidak habis atau menurun, tetapi terpelihara sebagai sumber daya yang hidup terus menjadi dasar untuk penggunaan secara terus menerus dimasa yang akan datang. Analisis daya angkut/muat (*Carrying capacity analysis*) merupakan suatu teknik yang penting untuk digunakan dalam pendekatan pembangaunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

6) Pendekatan Komunitas (*Community approach*)

Terdapat keterkaitan maksimum komunitas lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kepariwisataan dan, lebih jauh lagi, terdapat partisipasi maksimum komunitas dalam pengembangan dan manajemen pariwisata, serta keuntungan-keuntungan sosial ekonominya.

7) Pendekatan Implementable (*Implementable approach*)

Kebijakan rencana dan rekomendasi pengembangan pariwisata diformulasikan menjadi realistik dan dapat diimplementasikan, Formulasi

kebijakan dan rencana itu menggunakan teknik-teknik implementasi yang mencakup strategi atau program aksi pengembangan

8) Aplikasi proses perencanaan sistematis

Proses perencanaan ini diterapkan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan pada urutan kegiatan. Pendekatan ini di aplikasikan secara konseptual pada semua tingkatan dan perencanaan pariwisata. Namun bentuk spesifik aplikasinya bervariasi tergantung pada jenis perencanaan yang diambil. Perencanaan pariwisata dipersiapkan pada berbagai tingkatan yang mana setiap tingkatan memfokuskan diri pada derajat kekhususan yang berbeda. Perencanaan ini harusnya direncanakan untuk memberikan kerangka gambaran dan arahan untuk mempersiapkan rencana-rencana. Urutan tingkatan itu dimulai dari tingkat perencanaan internasional, nasional, regional/Provinsi, perencanaan sub regional/provincial, perencanaan daerah wisata, perencanaan fasilitas pariwisata dan design fasilitas pariwisata.

2.1.6 Perilaku Berwisata Generasi Milenial

Generasi merupakan konstruksi sosial yang terdiri dari sekelompok orang usia dan mempunyai pengalaman history yang sama. Individu – individu yang menjadi bagian dari satu generasi mempunyai kesamaan tahun lahir dengan rentang waktu 20 tahun serta berada di dalam dimensi sosial budaya yang sama. (Nugraheni, 2019)

Generasi muda menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah sejumlah orang-orang muda yang berusia antara 16 tahun sampai 30 tahun. Generasi milenial adalah orang-orang yang lahir di awal tahun 1980an sampai 2000an dan sering juga disebut generasi Y. (Nugraheni, 2019)

Generasi muda atau generasi milenial saat ini cenderung menyukai kegiatan berwisata dan memiliki perilaku yang unik, Mereka cenderung spontan memiliki pengetahuan destinasi wisata yang lebih banyak yang mana lebih aktif mencari informasi terkait dengan destinasi wisata terbaru, namun tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan perencanaan, dan mudah terpengaruh pada usulan-usulan destinasi wisata internet terutama pada media sosial. Hal ini dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi karena generasi milenial merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan teknologi.

Generasi baru wisatawan milenial atau Asian Milenial Travellers (AMTs) akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perkembangan sector pariwisata karena jumlahnya saat ini mencapai seperempat dari populasi di wilayah Asia secara keseluruhan dan 20 % dari keseluruhan wisatawan internasional. (Nugraheni, 2019)

Berbicara soal generasi milenial dan jenis wisata yang disukai meskipun generasi milenial menyukai untuk pergi ke tempat yang memiliki spot foto yang menarik mereka menginginkan untuk berwisata dimana kegiatan dilakukan diluar ruangan dan mendapatkan pengalaman baru, seperti kegiatan wisata yang informatif dan pengalaman yang mendalam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk berfoto atau *selfie*. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan bahwa generasi muda ini bergerak dari pariwisata massal kepada pengalaman autentik seperti yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Generasi milenial lebih suka pada saat melakukan kegiatan berwisata mereka mendapatkan pengalaman unik yang baru dan berbeda dari biasanya. Wisatawan milenial menyukai untuk tinggal di tempat yang mudah dikunjungi, tersedia diaplikasi pemesanan online memiliki kelengkapan informasi di online, yang mana memberikan mereka kualitas yang baik serta harganya sesuai dengan harga terbaik dan fasilitas yang memadai.

2.1.7 Peran Pariwisata terhadap Pembangunan

Sektor pariwisata merupakan sector yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan, pada era globalisasi sekarang ini pembangunan pariwisata menjadi prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu wilayah. Selain itu sector pariwisata dapat memperbaiki perekonomian wilayah.

Peran pariwisata terhadap pembangunan mempunyai faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah karena dapat mendorong perkembangan beberapa sector perekonomian nasional. WTTC (World Travel &

Tourism Council) merekomendasikan agar industry pariwisata dijadikan prioritas strategis di Indonesia dengan mengakui kontribusi dampak dari pariwisata terhadap perekonomian yang membentuk wahana pengembangan industry yang efektif dan menuju pasar terbuka dan kompetitif melalui liberalisasi pasar dan peningkatan promosi, menerapkan pembangunan berkelanjutan dan menghapus kendala pertumbuhan melalui investasi sumber daya manusia dan perluasan prasarana. Dampak Pariwisata terhadap ekonomi mencakup kebijakan terkait kesempatan berusaha, kesempatan kerja, transportasi, akomodasi, prasarana, pengembangan wilayah, perpajakan, perdagangan dan lingkungan. (Hanif, 2013)

Dalam rangka pembangunan wilayah sector pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sector-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sector kepariwisataan berarti akan meningkatkan perannya di wilayah dimana kepariwisataan merupakan komponen utama dalam suatu wilayah.

Kebijakan dan langkah pengembangan pariwisata Indonesia menurut Muljadi (2012:72-78) dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia diperlukan strategi melalui kebijakan dan Langkah-langkah yang harus di laksanakan secara terus-menerus. Kebijakan tersebut antara lain (arrniti, 2018):

1. Menjadikan pariwisata sebagai penghasilan devisa utama
2. Menjadikan pariwisata sebagai pendorong pembangunan
3. Meningkatkan ketangguhan kepariwisataan
4. Peningkatan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan
5. Peningkatan Kemitraan masyarakat, swasta dan media massa
6. Peningkatan kerja sama lintas sectoral

2.1.8 Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari sector industry yang mempunyai potensi serta peluang yang besar untuk di kembangkan. Peluang tersebut didukung oleh kondisi-kondisi alamiah seperti letak dan keadaan geografis. Pengelolaan pariwisata mempunyai pengaruh yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari

datangnya wisatawan ke suatu wilayah tertentu yang mempunyai kondisi berbeda dari tempat asal wisatawan tersebut. Perkembangan pariwisata yang pesat menyebabkan berbagai dampak. Secara umum dampak ditimbulkan adalah dampak positif dan negative (Waluya, 2019) yaitu :

1. Penyumbang devisa negara
2. Menyebarkan pembangunan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggadaan (Multiplier effect)
5. Wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa didunia semakin luas
6. Mendorong semakin meningkatnya Pendidikan dan keterampilan penduduk

Dampak Negatif yang timbul dari pariwisata secara ekonomi yaitu :

1. Semakin ketatnya persaingan harga antar sector
2. Harga lahan yang semakin tinggi
3. Mendorong timbulnya inflasi
4. Bahaya terhadap ketergantungan yang tinggi dari negara terhadap pariwisata
5. Meningkatkan kecenderungan impor
6. Menciptakan biaya-biaya yang banyak
7. Perubahan system dalam moral, etika, kepercayaan dan tata pergaulan dalam masyarakat misalnya bergotong royong, sopan santun dan lain-lain
8. Memudahkan kegiatan mata-mata dan penyebaran obat terlarang
9. Dapat meningkatkan pencemaran lingkungan seperti sampah, vandalisme, rusaknya habitat flora dan fauna tertentu, udara, dan tanah

Dampak Pariwisata terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yaitu :

1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga-harga

5. Dampak terhadap distribusi
6. Dampak terhadap kepemilikan dan control
7. Dampak terhadap pada pembangunan pada umumnya
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

2.2 Tinjauan Kebijakan

Dalam tinjauan kebijakan ini terdapat beberapa kebijakan yang digunakan sebagai dasar hukum atau acuan pada penelitian ini

2.2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

- 1) Pembangunan Kepariwisataan Nasional meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata
 - b. Pemasaran Pariwisata
 - c. Industri Pariwisata
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan
- 2) Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS.
- 3) RIPPARNAS memuat :
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tujuan
 - d. Sasaran
 - e. Arahana Pembangunan Kepariwisataan Nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
- 4) Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

- 5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:
 - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional daerah dan masyarakat
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
 - d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber data manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- 6) Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
 - b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab
 - c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata Kelola pemerintah yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien.
- 7) Sasaran Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud :
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

- b. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
 - c. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara
 - d. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
 - e. Produk domestik bruto dibidang kepariwisataan.
- 8) Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan
 - b. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
 - c. Dengan tata Kelola yang baik
 - d. Secara terpadu lintas sector, lintas daerah dan lintas pelaku dan
 - e. Dengan mendorong kemitraan sector public dan privat.

Pelaksanaan RIPPARNAS diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

- 1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional
- 2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi
- 3) RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota

Untuk mensinergiskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisata

Pada Undang- undang ini membahas tentang Asas, Fungsi, Tujuan kepariwisataan yang diselenggarakan berdasarkan Asas :

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan
- c. Adil dan merata
- d. Keseimbangan
- e. Kemandirian
- f. Kelestarian
- g. Partisipatif
- h. Berkelanjutan
- i. Demokratis
- j. Kesetaraan dan
- k. Kesatuan

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dan sesama manusia dan hubungan antar manusia dan lingkungan
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan local
- c. Memberi manfaatn untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan propesionalitas
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
- e. Memberdayakan masyarakat setempat
- f. Menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan suatu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembangunan Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pemabangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. Industri Pariwisata
- b. Destinasi Pariwisata
- c. Pemasaran dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan

Pembangunan Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

2.2.3 Perpres No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Kepariwisata

Pada peraturan daerah ini membahas tentang Pengawasan dan Pengendalian yang mana di meliputi :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pencegahan kegiatan pariwisata yang menimbulkan dampak negative dilakukan dengan cara :

- a. Mentaati tata ruang
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan
- c. **Melibatkan** masyarakat local dalam pengelolaan kepariwisataan
- d. Melakukan pemantauan lingkungan
- e. Mensosialisasikan kepariwisataan dan
- f. Menggunakan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negative dilakukan dengan :

- a. Mengisolasi lokasi, orang, wisatawan/pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negative kegiatan pariwisata
- b. Menghentikan sumber penyebab dampak negative dari kegiatan pariwisata

- c. Melakukan Tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negative dan atau
- d. Menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2.4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028

Pada Peraturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ini membahas mengenai :

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2028 menganut asas:

- 1) Asas dan Ruang Lingkup
 - a. Manfaat
 - b. Kekeluargaan
 - c. Adil dan merata
 - d. Keseimbangan
 - e. Kemandirian
 - f. Kelestarian
 - g. Partisipatif
 - h. Berkelanjutan
 - i. Demokratis
 - j. Kesetaraan
 - k. Kesatuan dan
 - l. Dapat dilaksanakan.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2028 ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Provinsi
- b. Pembangunan DPP

- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- d. Pembangunan Industri Pariwisata
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
- f. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Provinsi
- g. Pengawasan Dan Pengendalian.

3) Pembangunan Kepariwisataan Provinsi meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata
- b. Pemasaran Pariwisata
- c. Industri Pariwisata dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan provinsi dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV. RIPPARPROV memuat ;

a. Visi

Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat.

b. Misi

- 1) Membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata nasional
- 2) Membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan dicintai para wisatawan
- 3) Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dari sector pariwisata
- 4) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dari sector pariwisata
- 5) Mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata
- 6) Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator
- 7) Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya dan

8) Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal

c. Tujuan

- 1) Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya Tarik wisata serta pelayanan
- 2) Secara Khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat

Tahap pelaksanaan RIPPARPROV dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

- 1) Tahap 1, Tahun 2013-2017
- 2) Tahap 2, Tahun 2018-2022
- 3) Tahap 3, Tahun 2023-2028

d. Sasaran

Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah peningkatan :

- 1) Kualitas dan kuantitas daya Tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
- 2) Tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal
- 3) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara
- 4) Produk domestik bruto dibidang kepariwisataan, Pendapatan daerah domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan
- 5) Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata dan

- 6) Terwujudnya industry pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi dibidang pariwisata, kerja sama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja dan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi tahun 2013 sampai dengan tahun 2028 yang mana dilaksanakan :
 - 1) Dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan
 - 2) Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dengan tata Kelola yang baik
 - 3) Secara terpadu secara lintas sector, lintas daerah, lintas pelaku dan
 - 4) Mendorong kemitraan sector public dan privat

Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten/Kota pemerintah Kabupaten/kota agar Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/kota yang mana harus di Konsultasikan dan di kordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.

4) Pembangunan DPP

Pembangunan DPP meliputi :

- a. Perwilayahan Pembangunan DPP
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata terdiri dari 3 pembagian Kawasan yang tersebar pada 14 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Kebijakan :

- 1) Pengembangan Kawasan di WILAYAH BARAT yaitu Tanjung Puting dan sekitarnya, Kawasan wisata Pantai Bogam Raya dan Kawasan Bekas Kesultanan Kotawaringin di Kabupaten Kotawaringin Barat, **kawasan Wisata Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara**, Kawasan Wisata Hutan Alam di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Kawasan Betang Tumbang Gagu dan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Desa Adat Bangkal dan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pembangunan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
- 2) Pengembangan Kawasan di WILAYAH TENGAH yaitu Sebangau, Betang Sei Pasah dan Agrowista Basarang di Kabupaten Kapuas, Kawasan Huma Ha'i di Buntoi Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Danau Taha'i, Bukit Tangkiling dan Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya, Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan Betang Rangan Bahekang di Kabupaten Katingan, Betang Malahoi, Air Terjun Bawin Kameloh, dan Bukit Keminting di Kabupaten Gunung Mas dengan Pusat Pengembangan di Kota Palangka Raya sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
- 3) Pengembangan Kawasan di WILAYAH TIMUR yaitu Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Lumut - Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara, Kawasan Danau

Sadar di Kabupaten Barito Selatan, Kawasan Taman Hutan Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur, Kawasan Gunung Bondang, Bukit Tunjuk, Betang Konut Kabupaten Murung Raya dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam

c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi pembangunan moda, sistem dan prasarana transportasi dalam mendukung pembangunan pariwisata

d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- 1) pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di Wilayah Barat yaitu **Kawasan Wisata Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara**, Pantai Bogam di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kawasan Betang Tumbang Gagu - Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Desa Bangkal - Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan

dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah, dan pendidikan dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam

- 2) pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah tengah yaitu Daya Tarik Wisata Agrowisata Basarang dan Betang sei Pasah di Kabupaten Kapuas, Kawasan Huma Hai Buntoi dan di Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Danau Tahai - Bukit Tangkiling dan Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya, Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan Betang Rangan Bahekang di Kabupaten Katingan, Betang Malahoi, Air Terjun Bawin Kameloh, dan Bukit Keminting di Kabupaten Gunung Mas dengan Pusat Pengembangan di Kota Palangka Raya sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, pendidikan, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
- 3) pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di Wilayah Timur yaitu Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Lumut - Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara, Kawasan Danau Sadar di Kabupaten Barito

Selatan, Kawasan Taman Hutan Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur, Kawasan Gunung Bondang, Bukit Telunjuk, Betang Konut Kabupaten Murung Raya dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam

e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata
- 2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata
- 3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata
- 2) Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata

- 2) mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat
- 2) meningkatkan motivasi, inovasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

f. Pengembangan investasi dibidang kepariwisataa

Arah Kebijakan Pembangunan Investasi dibidang pariwisata meliputi :

- 1) Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
- 3) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana meliputi :

- 1) Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
- 2) Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang

pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana meliputi :

- 1) Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata
- 2) Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan

Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana meliputi :

- 1) Menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata
- 2) Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri
- 3) Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

5) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi :

a. Pembangunan pasar wisatawan

Arah kebijakan pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan
- 2) Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang
- 3) Membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar
- 4) Membangun dan mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- 5) Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata
- 6) Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain

b. Pembangunan citra pariwisata

Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata sebagaimana meliputi :

- 1) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah secara berkelanjutan baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi
- 2) Peningkatan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing
- 2) Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi

Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kalimantan Tengah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- 1) Karakter geografis kepulauan
- 2) Nilai spiritualitas dan kearifan local
- 3) Keanekaragaman hayati alam dan budaya
- 4) Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah
- 5) Ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.

Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

c. Pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata

Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Strategi untuk pembangunan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana meliputi meningkatkan:

- 1) Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata provinsi

- 2) Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

d. Pembangunan promosi pariwisata

Arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di dalam negeri
- 2) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di luar negeri.

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di dalam negeri sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Memperkuat fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri
- 2) Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi pariwisata kabupaten.

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Memperkuat fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kalimantan Tengah
- 2) Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kalimantan Tengah di tingkat Nasional.

Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kalimantan Tengah di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kalimantan Tengah dengan pelaku promosi pariwisata Kalimantan Tengah yang berada di luar negeri.

6) Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi

Pembangunan industri pariwisata provinsi meliputi :

a. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata
- 2) Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing
- 3) Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait

b. Peningkatan Daya saing produk pariwisata

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana meliputi :

- 1) Daya saing Daya Tarik Wisata
- 2) Daya saing Fasilitas Pariwisata
- 3) Daya saing Aksesibilitas

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata

Strategi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana, meliputi:

- 1) Mengembangkan Manajemen atraksi
- 2) Memperbaiki Kualitas interpretasi
- 3) Memperkuat Kualitas produk wisata
- 4) Meningkatkan Pengemasan produk wisata
- c. Pembangunan kemitraan usaha pariwisata
- d. Penciptaan kreadibilitas bisnis
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan
- 7) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. Pembangunan Organisasi Kepariwisataan

Arah kebijakan pembangunan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah

Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 2) Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota

Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor

- 3) Optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah

Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan cara :

-) Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah
 -) Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata
- 4) Optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud, dengan cara:
 -) Memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat
 -) Memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana, meliputi:

- 1) Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah
Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dengan cara:
 -) Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan kabupaten/kota
 -) Pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata

2) Akselerasi kualitas institusi pendidikan
Kepariwisataan

Strategi untuk akselerasi kualitas Pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dengan cara :

-) Penguatan institusi Pendidikan pariwisata
-) Pengembangan kerja sama antara institusi Pendidikan dan industry pariwisata

3) Standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik

Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud, dengan cara:

-) Sertifikasi profesi tenaga pendidik , guru atau dosen
-) Akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataan.

4) Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata

Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud, dengan cara :

-) Perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata
-) Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata
-) Sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan

2.2.5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini terdapat pembahasan mengenai :

- Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

- Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi
- Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam
- Kawasan Peruntukan Pariwisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013-2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah, dan Timur) yang meliputi daya Tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- Arahan peraturan zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Memperhatikan pengembangan destinasi pariwisata
 - b. Memperhatikan pengembangan Nilai Seni dan Budaya meliputi pembinaan dan pelestarian terhadap budaya Dayak, situs serta warisan sejarah di Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Dalam Kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industry yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam
 - d. Pada Kawasan pariwisata dipekenankan dilakukan Penelitian dan Pendidikan.
 - e. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan serta studi AMDAL

- f. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan system prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan
- g. Perkembangan objek wisata bahari tidak boleh menimbulkan dampak gangguan atau kerusakan pada ekosistem laut
- Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan, makanan olahan
 - b. fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi/angkutan.

2.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Pada Peraturan Daerah ini menyebutkan Peruntukan Pariwisata yang ada di Kabupaten Sukamara meliputi :

- a. kawasan wisata alam Bukit Patung yang terdapat di Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 1200 hektar
- b. kawasan wisata Pantai Kuala Jelai yang terdapat di Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 530 hektar
- c. kawasan wisata Pantai Tanjung Nipah yang terdapat di Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 250 hektar
- d. kawasan wisata Pantai Tanjung Selaka yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 300 hektar
- e. kawasan wisata Pantai Sungai Tabuk yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar
- f. kawasan wisata terbatas Danau Burung yang terdapat di Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 200 hektar
- g. kawasan wisata Pantai Sei Pasir yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar

- h. kawasan wisata Pantai Kampung Baru yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar
- i. kawasan cagar budaya/kota lama dan kawasan wisata makam Datuk Nahkoda HM Thaib di Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 370 hektar

Penetapan Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- a. Kawasan strategis pusat perkotaan di kecamatan Sukamara
- b. Kawasan unggulan sektor perkebunan kelapa sawit di Balai Riam Kecamatan Balai Riam
- c. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan agropolitan di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci
- d. Kecamatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci sebagai kawasan andalan untuk pertambangan, logam, pasir kwarsa dan kerajinan
- e. Kawasan unggulan **pariwisata** pantai di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai

Perwujudan kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud meliputi :

Perwujudan kawasan pariwisata:

- a. pengembangan kawasan wisata terpadu
- b. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata
- c. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan
- d. melaksanakan berbagai kegiatan promosi
- e. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif
- f. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu
- g. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata

- h. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah
- i. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 - 1) pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan
 - 3) kegiatan budidaya pesisir, **pariwisata**, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah ada
 - 4) pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan
 - 5) permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industry
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan **pariwisata**
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f ditetapkan sebagai berikut

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, **kawasan pariwisata**, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
- d. dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) penentuan lokasi dan penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur didalam peraturan pemerintah yang berdiri sendiri.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- 1) pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata
 - 2) pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - 3) perlindungan situs warisan budaya setempat
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
- 1) kegiatan kepariwisataan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan rumah tangga serta membangkitkan sektor jasa masyarakat
 - 2) pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata
 - 3) pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan wisata dan yang kegiatan-kegiatan pendukungnya. Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah

- g. Menciptakan kesempatan kerja
- h. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kawasan Strategis lingkungan adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis lingkungan. Spesifikasi penetapan kawasan strategis lingkungan adalah

- a. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air
- b. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
- c. Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas
- d. terhadap kelangsungan kehidupan
- e. Potensi ekonomi potensial berkembang
- f. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan **pariwisata**
- g. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayat
- h. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora danatau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
- i. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
- j. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
- k. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
- l. merupakan kawasan rawan bencana alam

Kawasan Strategis Ekonomi adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis ekonomi. Spesifikasi penetapan kawasan strategis ekonomi yaitu :

- a. Potensi ekonomi cepat tumbuh
- b. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- c. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
- d. khususnya sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian, **pariwisata**, peternakan dan perikanan
- e. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- f. Kawasan yang ditetapkan harus berada dalam lingkup kabupaten
- g. Merupakan potensi ekspor
- h. Merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhataikan mengenai kekurangan dan kelebihan anantara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi	Jurnal Planoeearth (PWK FT UMMat ISSN 2615-4226 Vol 3 No. 1 Februari 2018 hal 7-11)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan didasarkan studi literatur dengan cara mencari teori yang relavan dengan permasalahan yang ditemukan.	Berdasarkan hasil berkaitan dengan pariwisata, pengentasan kemiskinan dapat disimpulkan : 1. Pariwisata merupakan suatu system yang dapat menjadi sector andalan perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengetasan kemiskinan 2. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			keseluruhan tahapan pembangunan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi terhadap pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan pariwisata. 3. Peningkatan sumber daya (SDM) berkaitan dengan pariwisata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran wisata bagi masyarakat yang berkonsekuensi pada

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			kesejahteraan dan pelayanan optimal yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. 4. Mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan manusia agar dapat lebih efektif sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. 5. Penghapusan kemiskinan membutuhkan usaha Bersama, pemerintah, organisasi masyarakat, sector wisata, dalam

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			konteks kemitraan global untuk pembangunan lebih kuat dan lebih efektif.
Analisa Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sambungan, Wonosobo, Jawa Tengah	Majalah Geografis Indonesia Vol. 32 No 2 September 2018 (170-176)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data penelitian menggunakan Analisa deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ialah data kualitatif.	Karakteristik pariwisata berdasarkan indicator pariwisata berkelanjutan di Desa Sembungan menunjukan perlunya banyak pembenahan untuk dapat mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Diantaranya di lihat dari segi atraksi wiata dan keunikan wisata, serta sumber daya manusia
Strategi Pengembangan	Journal of Indonesia Applied Economics Vol.3. No.1 Mei 2009,37-47	Penelitian ini menggunakan metode	1. Pulau semampu merupakan wilayah

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
Ekowisata berbasis Ekonomi Lokal dalam rangka Program Pengetasan kemiskinan diwilayah Kabupaten Malang		kualitaitif dan metode Analisa SWOT yang mana Analisa SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi relasi - relasi sumber daya ekowisata dengan sumber daya yang lain.	wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata yang menarik bagi wisatawan domestic dan internasional yang ingin menikmati konsep ekowisata. 2. Pengembangan ekowisata diwilayah Pulau Sempu hendaknya dapat diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta tidak berbenturan dengan upaya konservasi yang telah dilakukan

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			oleh pemerintah daerah diwilayah ini. 3. Pengembangan Ekowisata dipulau sempu semaksimal mungkin harus dapat melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara optimal dalam setiap proses-proses didalamnya. Hal ini dilakukan guna memberikan ruang yang luas bagi masyarakat setempat dan untuk menikmati keuntungan

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			secara ekonomi dari pengembangan ekowisata di wilayah ini. 4. Peningkatan Kerjasama perlu untuk ditingkatkan dengan institusi atau Lembaga terkait, seperti agen perjalanan dan unit aktivitas mahasiswa pencinta alam, guna melahirkan ide-ide yang kreatif guna pengembangan wilayah ekowisata. Selain itu keterlibatan mereka juga diharapkan untuk

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			memperkuat konsep ekowisata di wilayah pulau sempu.
Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 1/Tahun 2018 Hal.95-103	Menggunakan Metode Analisis SWOT yang mana analisis SWOT ini dilakukan dengan : 1. Menganalisis Faktor strategi internal dan eksternal 2. Membuat Analisa factor strategi internal (IFAS) dan Analisa Faktor	Berdasarkan hasil analisi yang menggunakan metode SWOT maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sector internal dan eksternal mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata pantai duta. Analisa SWOT merupakan strategi perencanaan dan pengembangan yang dapat di terapkan pada objek wisata. Strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan potensi pariwisata pantai duta di

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
		Strategis Eksternal (EFAS)	Kabupaten Probolinggo antara lain : S-O Tarik wisata dan strategi pengembangan, S-T yang menghasilkan strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan, W-O menghasilkan strategi peningkatan kualitas, dan W-T menghasilkan strategi pengembangan sumber daya manusia.
Strategi Pengembangan Pariwisata Alam Taman	Jurnal WASIAN Vol.2 No.1 Tahun 2015:9-20	Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu :	Berdasarkan analisis penawaran wisata, diketahui bahwa jenis-jenis obyek yang dimiliki TWA Wera terdiri dari pemandangan alam, gejala alam (Air Tejun

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
Wisata Alam Wera		1. Analisis Penawaran (supply) wisata 2. Analisis Permintaan (demand) wisata 3. Analisis Strategi Pengembangan (swot)	Wera dan Sungai Wera), keanekaragaman flora dan fauna, religi, dan budaya. Namun ketersediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang pengembangan wisata alam belum memadai. Tingginya minat masyarakat sekitar untuk berpartisipasi merupakan salah satu faktor penunjang bagi pengembangan wisata alam tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan baik dari segi pendanaan (sumber dana) maupun peningkatan Sumber

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
			Daya Manusia (SDM) yang terlibat. Berdasarkan analisis permintaan wisata diketahui bahwa perbaikan sarana dan prasarana aksesibilitas menuju Air Terjun Wera dan peningkatan fasilitas serta pelayanan merupakan faktor utama permintaan wisatawan terhadap pengembangan wisata alam di kawasan TWA Wera.
Pengembangan Kawasan Pariwisata Alam di	http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA Volume 9 No 1,2020 P-ISSN 2085-7020	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan	Faktor-faktor penyebab kurang berkembangnya objek wisata di kecamatan Motoling dan Motoling Barat adalah masih

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
Kecamatan Motoling dan Motoling Barat		diawali kegiatan pengumpulan data di lapangan, Survey yang akan dilakukan terdiri dari 2 jenis yaitu: 1. Survey Data Primer: Foto Lokasi Penelitian, Observasi Lapangan dan Kuesioner, 2. Survey Data Sekunder Survey Instansi di Kecamatan dan Desa Data statistik, laporan, shapefile dan kebijakan terkait penelitian. Mengukur IFAS dan EFAS	kurangnya fasilitas umum seperti area. Hal ini menyebabkan ketiga objek wisata belum berkembang. Sementara itu konsisi akses menuju ketiga objek tersebut belum menunjang dengan kualitas fisik yang buruk. Hal ini merupakan faktor utama belim berkembangnya ketiga objek tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan pembahasan menunjukkan bahwa ketiga objek wisata tersebut masuk dalam kuadran I sehingga posisi usaha menjadi aspek yang

Penelitian dan Judul Penelitian	Publikasi	Metode	Hasil
		menggunakan metode pengukuran analisis SWOT yang didapat dari hasil observasi lapangan dan wawancara dan juga ditambah bantuan oleh analisis distribusi frekuensi dengan bantuan software SPSS, serta bantuan software ArcGIS juga yang akan membantu dalam pemetaan pengembangan kawasan pariwisata.	sangat menguntungkan. Aspek usaha memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan secara optimal. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan adalah strategi pertumbuhan (Growth Strategy) atau strategi agresif

2.4 Best Practice

Setiap daerah mempunyai caranya sendiri dalam mengelola pariwisatanya. Keberhasilan pengelolaan tempat wisata tergantung pada faktor-faktor yang berbeda dan dapat menjadi tolak ukur bagi kawasan wisata lain yang memiliki tipe wisata sejenis. Di Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam kepariwisataan alam terutama wisata pantai. Hasil dari best practice yang ada akan dijadikan pertimbangan dalam Strategi Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Sukamara. Salah satu wisata yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaannya adalah Bali.

Bali merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan tempat wisatanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bali memiliki obyek wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. Di Bali terdapat sekitar 54 lokasi obyek wisata yang tersebar di delapan kabupatennya

Bali dan pariwisatanya tidak bisa dipisahkan. Sebagai daerah tujuan wisata utama, kekayaan dan keindahan alam, serta keunikan di dalam negeri tetapi di luar negeri juga. Bali ini memiliki julukan Pulau Dewata karena memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh agama hindu. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi andalan bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga seluruh lapisan masyarakatnya banyak berharap dari sektor jasa ini. faktor yang menyebabkan bali sebagai daerah tujuan wisata andalan di Indonesia, karena memiliki kekhasan pada obyek wisatanya, baik wisata alam maupun wisata budaya. Selain itu, didukung pula oleh sarana dan prasarana yang lengkap.

Sejak tahun 1990 Bali telah menganut konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisatanya. Bali mampu membangun pariwisata yang berlandaskan dengan akar kebudayaan Bali yang dijiwai religi Hindu yaitu Pariwisata Budaya. Konsep ini relevan dengan pariwisata berkelanjutan, yang mana elemen-elemennya sama-sama memperhatikan keberlanjutan alam, ekonomi dan sosial budaya. Selain pemerintah, bali juga melibatkan masyarakatnya dalam industri pariwisata terutama untuk menjadi guide bagi wisatawan yang datang. Dengan adanya guide ini wisatawan menjadi terbantu karena tidak perlu susah-susah bila akan mencari obyek wisata atau hanya sekedar mencari jalan, karena guide yang ditawarkan di Bali ini

akan mengantarkan wisatawan untuk berkeliling mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada.

Pembangunan pariwisata di Bali berbasiskan masyarakat lokal, ditandai dengan semakin jelas terlihat yaitu telah didistribusikannya manfaat positif pariwisata kepada masyarakat setempat. Masyarakat lokal dilibatkan dan diberikan otoritas untuk mengelola potensi-potensi pariwisata yang dimilikinya. Masyarakat tidak lagi menjadi komunitas yang termarginalisasi dan didominasi oleh penguasa, namun telah memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang ada di daerahnya. Selain itu keuntungan yang dapat diperoleh adalah masyarakat lokal menjadi mandiri dan kreatif dalam mengelola aset daerahnya, sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha lokal yang handal dan mampu berkompetisi dengan investor luar.

Dengan dikembangkannya pariwisata yang berkelanjutan, maka akan menyeimbangkan pembangunan pariwisata di seluruh lingkaran Bali. Pembangunan pariwisata yang didominasi oleh Bali Selatan telah diarahkan pemerataannya menuju Bali Utara. Hal ini ditandai dengan berkembangnya produk wisata alternatif, misalnya pengembangan pariwisata Plaga, Kintamani, dan DTW lainnya. Selain itu masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, juga akan mendapatkan tambahan penghasilan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Kawasan daya Tarik wisata masih bisa dikembangkan dengan memperhatikan factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Selain itu pemerintah dan pengelola bisa juga menjadikan factor kekuatan dan peluang upaya pengembangan pariwisata yang ada di sana. Perumusan Strategi pengembangan potensi wisata alam menghasilkan 9 strategi yaitu :

1. Promosi dan publikasi melalui pembuatan paket wisata'
2. Pembangunan jalur trekking dan sarana outbon
3. Pelatihan penyuluhan konservasi lingkungan
4. Koordinasi perlindungan kaawasan wisata

5. Evaluasi dan monitoring secara berkala mengenai dampak wisata
6. Kolaborasi dan Kerjasama dengan investor mengenai pengembangan dan pengelolaan potensi wisata alam yang ada
7. Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan wisata alam
8. Pembuatan Rencana pengelolaan dan Pemantapan Kawasan wisata
9. Pelatihan dalam bidang kepariwisata seperti pelatihan *tour guiding*, pengelolaan homestay dan pelatihan *culinary*

